

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Oleh

Hj. MUSKIBAH, S.H., M. Hum

ABSTRAK

Secara teoretis, berbicara mengenai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, maka setidaknya akan menyinggung 2 makna, yakni tanggung jawab dalam makna **responsibility** atau tanggung jawab moral atau etis, dan tanggung jawab dalam makna **liability** atau tanggung jawab yuridis atau hukum.

CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar responsibility karena bersifat voluntary, tetapi harus dilakukan sebagai mandatory dalam makna liability karena disertai dengan sanksi. Penanam modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing tidak dibenarkan hanya mencari keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait, tetapi harus tunduk dan mentaati ketentuan CSR sebagai kewajiban hukum jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan iklim investasi bagi penanam modal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui pelaksanaan CSR. CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis.

Konteks tanggung jawab social (CSR) dalam hal ini adalah kewajiban bertanggung jawab atas perintah undang-undang, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkan. Demikian pula pemerintah sebagai agen yang mewakili kepentingan publik, sudah sepatutnya memiliki otoritas untuk melakukan penataan atau meregulasi CSR.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Penanaman Modal

A. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut dengan Corporate Social Responsibility (disingkat dengan CSR) lahir pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Pada prinsipnya CSR merupakan kegiatan yang berawal dari kesadaran perusahaan dan bersifat

sukarela. Cikal bakal CSR bermula dari kegiatan perusahaan yang sering kali bersifat spontanitas dan belum terkelola dengan baik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha serta dengan adanya tuntutan masyarakat dan dunia usaha, maka CSR mulai berkembang. Perusahaan tidak lagi sekedar menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit (keuntungan) dalam menjaga kelangsungan usahanya, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat (sosial) dan lingkungannya¹

Secara konseptual CSR adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Dalam konsep yang luas, CSR mencakup kepatuhan perusahaan kepada Hak Azasi Manusia, Perburuhan, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup. Sedangkan dalam pengertian yang sempit yaitu pembangunan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan berada.

Apabila dikaitkan dengan dengan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan stakeholder dalam arti luas dari pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan perusahaan belaka². Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak tertentu dalam masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat UUPM), dinyatakan bahwa “ Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”. Sedangkan tujuan dari dikeluarkannya UUPM adalah untuk memberikan kepastian hukum serta adanya transparansi dan tidak membedakan serta memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri

Kewajiban untuk melaksanakan CSR bagi setiap penanam modal diatur dalam Pasal 15 huruf b UUPM No. 25 Tahun 2007 yang menyatakan “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan

¹ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik : 2007, hal. xxiv

² Sonny A. Keraf, *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hal. 122-127

sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Apabila tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat 1 UUPM).

Kewajiban untuk melaksanakan CSR juga diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kedua ketentuan undang-undang tersebut membuat fobia sejumlah kalangan terutama pelaku usaha lokal. Pro dan kontra terhadap ketentuan tersebut masih tetap berlanjut sampai sekarang. Kemudian kalau ditelaah lebih lanjut terlihat bahwa ketentuan Pasal 74 UUPT tersebut, hanya menyebutkan perseroan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, bagaimana dengan perusahaan yang tidak bergerak di sektor sumber daya alam, apakah tidak memiliki kewajiban CSR, kemudian sanksi apa saja yang dapat dikenakan pada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR tersebut. Di samping itu aspek-aspek penting pemenuhan hak masyarakat lokal antara lain, hak atas informasi, hak atas lingkungan yang sehat dan hak partisipasi dimana mereka adalah pihak yang secara langsung dan tidak langsung terkena dampak dari beroperasi suatu perusahaan juga perlu diperjelas.

Berdasarkan ketentuan UUPM dan UUPT tersebut di atas, CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis. Pelaksanaan CSR secara konsisten oleh perusahaan akan mampu menciptakan iklim investasi, karena ada kewajiban bagi setiap penanam modal mentaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain berbicara mengenai tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, mengandung arti tanggung jawab dalam pengertian responsibility atau tanggung jawab moral atau etis, dan tanggung jawab dalam arti liability atau tanggung jawab hukum.

Berbicara tanggung jawab dalam makna liability, berarti berbicara tanggung jawab dalam ranah hukum, dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Dalam hukum keperdataan, prinsip-prinsip tanggung jawab dapat dibedakan sebagai berikut : 1)Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (liability based on fault); 2)Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga(presumption of liability); 3)Prinsip tanggung jawab mutlak (absolute liability or strict liability).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbedaan antara tanggung jawab dalam makna responsibility dengan tanggung jawab dalam makna liability pada hakekatnya hanya terletak pada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum, maka termasuk dalam makna responsibility, dan sebaliknya, jika tanggung jawab itu telah diatur di dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna liability.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pengaturan CSR dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta bagaimana implikasinya terhadap kegiatan penanaman modal.

C. Pembahasan

1. Pengaturan CSR

Sebelum membahas mengenai CSR dalam kaitannya dengan penanaman modal, perlu kiranya mengetahui apa yang dimaksud dengan CSR. Sampai saat ini belum ada kesamaan pandang mengenai konsep dan penerapan CSR, meskipun kalangan dunia usaha menyadari bahwa CSR ini amat penting bagi keberlanjutan usaha suatu perusahaan. Gurvy Kavei mengatakan, bahwa praktek CSR dipercaya menjadi landasan fundamental bagi pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi *stakeholders* dalam arti keseluruhan.³

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

³ Gurvy Kavei dalam Teguh, *Tanggung Jawab Sosial Harus Dilakukan*, Makalah Pada Seminar Corporate Social Responsibility : Integrating Social Aspect into The Business, Yogyakarta, 2006,

kehidupan dan lingkungan baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya Ketentuan Pasal 16 huruf d Undang-Undang Penanaman Modal menentukan bahwa “setiap penanam modal bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup”.

Dari ketentuan yang terdapat baik di dalam UUPM maupun UUPT yang tersebut di atas diketahui bahwa konsep mengenai CSR tampaknya belum ada keseragaman ataupun persamaan persepsi. UUPM lebih menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia beroperasi. Sedangkan UUPT justru mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan. UUPM bertolak dari konsep tanggung jawab perusahaan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). Namun demikian keduanya mempunyai tujuan yang sama mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

Menurut Ridwan Khairandy, adanya pengaturan CSR pada dua undang-undang tersebut menimbulkan beberapa kontroversi, baik yang berkaitan dengan konsep CSR itu sendiri maupun yang berkaitan dengan tanggung jawab yang diderivasi dari etika bisnis menjadi suatu norma hukum⁴.

Melalui regulasi CSR yang demikian terdapat kesan bahwa negara melepaskan tanggung jawabnya atas persoalan sosial dan perlindungan lingkungan dengan mengalihkannya kepada korporasi. Di sisi lain regulasi CSR membuka peluang korporasi meletakkan cost CSR kepada konsumen. Sedangkan tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah keadilan sosial dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Keterkaitan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat menurut Bagir Manan dalam Abrar Saleng, akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

- (1) Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat dari kekayaan alam, harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- (2) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;

⁴Ridwan Khairandy & Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hal.13.

- (3) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.⁵

Apabila ditarik dari berbagai pengertian di atas maka CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan pada stakeholders dalam arti luas dari sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan maupun penanam modal mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan ataupun penanam modal dibenarkan mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait.

Kemudian kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 huruf b UUPM yang menyatakan "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Apabila tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat 1 UUPM).

Selanjutnya kewajiban untuk melaksanakan CSR yang diatur dalam Pasal 74 UUPT 2007 sebagai berikut :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Dengan adanya pengaturan mengenai CSR tersebut, dapat dikatakan bahwa CSR telah ditetapkan sebagai suatu kewajiban hukum yang memiliki sanksi dan diberlakukan terbatas pada perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam. Sedang

⁵ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hal. 17

pendanaan untuk kegiatan CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Penetapan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral an-sich, tetapi diyakinkan sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan. Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, dan atau eksklusif dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial. Sehingga tidak berlebihan jika ke depan CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar responsibility karena bersifat voluntary, tetapi harus dilakukan sebagai mandatory dalam makna liability karena disertai dengan sanksi.

Menyikapi kondisi yang ada tersebut, bahwa hukum sebagai produk kebijakan politik tidak selamanya merupakan *conditio sine qua non* bagi tujuan yang hendak dicapai. Hal ini menunjukkan hukum mempunyai batas-batas kemampuan tertentu untuk mengakomodasi nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam komunitas masyarakat, oleh karena itu Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas hukum yang utama adalah "*social engineering*". Dalam doktrin ini dikatakan bahwa hukum harus dikembangkan sesuai dengan perubahan-perubahan nilai sosial. Untuk itu sebaiknya diadakan rumusan-rumusan kepentingan yang ada dalam masyarakat yaitu kepentingan pribadi, masyarakat dan umum.⁶ Dengan demikian hukum bagi Roscoe Pound merupakan alat untuk membangun masyarakat (*law is a tool of social engineering*). Sehingga hukum bukan saja berdasarkan pada akal, tetapi juga pengalaman. Akal diuji oleh pengalaman dan pengalaman yang dikembangkan oleh akal.

Konteks tanggung jawab sosial (CSR) dalam hal ini ada kewajiban bertanggung jawab atas perintah undang-undang, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkan. Tanggung jawab sosial berada pada ranah moral, sehingga posisinya tidak sama dengan hukum. Moral dalam tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap batiniah, sikap inilah yang dikenal dengan "moralitas" yaitu sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Sedangkan tanggung jawab hukum lebih menekankan pada ksesuaian sikap lahiriah dengan aturan, meskipun tindakan tersbut secara obyektif tidak salah, barangkali baik dan sesuai dengan

⁶ Roscoe Pound Dalam Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-Dasar Filsafat Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, 1992, hal.68.

pandangan moral, hukum, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Namun demikian kesesuaian saja tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan karena tidak tahu motivasi atau maksud yang mendasarinya.

Saat ini kondisi Indonesia menghendaki adanya CSR sebagai suatu kewajiban hukum. Hal ini mengingat belum adanya kesadaran moral yang cukup dan bahkan seringkali terjadi sesuatu yang diatur saja masih dilanggar, apalagi kalau tidak diatur, misalnya terjadi perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, tidak membayar pajak. Kemudian kebanyakan perusahaan juga cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar. Apabila situasi dan kondisi yang terjadi masih seperti tersebut di atas, maka hukum harus berperan. Tanggung jawab perusahaan yang semula adalah tanggung jawab non hukum (*responsibility*) akan berubah menjadi tanggung jawab hukum (*liability*). Otomatis perusahaan yang tidak memenuhi perundang-undangan dapat diberi sanksi.

2. Implikasi Pengaturan CSR Terhadap Kegiatan Penanaman Modal

Sebagai sebuah komitmen perusahaan, pelaksanaan CSR pada dasarnya adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait dengan pelaksanaan CSR, ada 4 kelompok perilaku perusahaan yakni :

- (1) Kelompok Hitam adalah perusahaan yang tidak melakukan praktek CSR sama sekali. Mereka adalah perusahaan yang menjalankan bisnis semata-mata untuk kepentingan sendiri tanpa memperhatikan aspek lingkungan sosial disekitarnya, termasuk kesejahteraan karyawannya.
- (2) Kelompok Merah, yakni perusahaan yang mulai melaksanakan CSR, tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungan.
- (3) Kelompok Biru, yakni kelompok perusahaan yang menilai praktek CSR akan membawa dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi, bukan biaya.
- (4) Kelompok Hijau, yakni perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya, CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan yang merupakan modal sosial⁷.
- (5)

⁷Suhandari M. Putri, Schema CSR, Kompas, 4 Agustus 2007.

Apapun bentuk perilaku perusahaan, Pasal 15 UUPM sudah mengamanatkan kewajiban untuk menerapkan CSR. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal, berdasarkan amanat Pasal 15 UUPM, diwajibkan untuk menerapkan CSR agar tetap tercipta hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat di sekitar perusahaan. Dengan demikian dasar dari CSR tersebut sebenarnya adalah etika bisnis yang dituangkan dalam bentuk tertulis, kemudian melahirkan kebijakan yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.

Dalam prakteknya untuk menerapkan CSR tersebut, perusahaan dianjurkan untuk membuat *Corporate Code of Conduct* yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diatur dalam UUPT. Baik buruknya amanat Pasal 74 UUPT yang mewajibkan perseroan menerapkan dan menganggarkan dana pelaksanaan CSR, tergantung pada peraturan pelaksanaan UUPT yang akan disusun oleh pemerintah.

Terkait hal tersebut dalam UUPT terdapat empat prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaku bisnis yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, dan *Fairness*⁸. Adapun contoh dari prinsip *Transparency*, yakni adanya penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Sedangkan prinsip *Accountability* menyangkut kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Selanjutnya prinsip *Responsibility* atau tanggung jawab, disini bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah berupa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian prinsip *Fairnes*, prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan prinsip GCG di atas, prinsip *responsibility* yang melahirkan gagasan CSR. Dalam CSR, perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, selain aspek financial juga sosial lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.⁹ Melalui penerapan prinsip ini diharapkan perusahaan dapat menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan dampak eksternal yang harus ditanggung oleh

⁸Ridwan Khairandy & Camelia Malik, op.cit. hal. 74

⁹Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.25

stakeholdernya. Karena itu wajar bila perusahaan juga memperhatikan kepentingan dan nilai tambah bagi stakeholdernya.

Sehubungan dengan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal, hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya diatur secara khusus dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 UUPM, dengan tujuan memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban perusahaan dalam rangka penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengaturan tanggung jawab perusahaan dalam rangka penanaman modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal yang akan dan sedang mengusahakan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan, wajib mengalokasikan dana untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku¹⁰

Dengan adanya kepastian hukum dan jaminan kenyamanan serta keamanan terhadap penanam modal, tentunya akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global yang merosot sejak terjadinya krisis moneter. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim investasi dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan faktor

¹⁰Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal.31

tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan yang diharapkan oleh pembentuk UUPM, didasarkan pada semangat ingin menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif yang salah satu aturannya mengatur tentang kewajiban untuk menjalankan CSR. Bagi pelaku usaha (pemodal baik dalam maupun asing) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan CSR baik dalam aspek lingkungan, sosial maupun budaya.

CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu harus dibantah pendapat yang menyatakan CSR identik dengan kegiatan sukarela, dan menghambat iklim investasi. CSR merupakan sarana untuk meminimalisir dampak negatif dari proses produksi bisnis terhadap publik, khususnya dengan para stakeholdernya. Maka dari itu, sangat tepat apabila CSR diberlakukan sebagai kewajiban yang sifatnya mandatory dan harus dijalankan oleh pihak perseroan selama masih beroperasi. Demikian pula pemerintah sebagai agen yang mewakili kepentingan publik. Sudah sepatutnya mereka (pemerintah) memiliki otoritas untuk melakukan penataan atau meregulasi CSR.

Pelaksanaan CSR secara konsisten oleh perusahaan akan menciptakan iklim investasi (penanaman modal). Anggapan yang mengatakan bahwa CSR akan menghambat iklim investasi patut ditolak. Ada kewajiban bagi setiap penanam modal yang datang ke Indonesia wajib mentaati aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia, apapun bentuknya. Indonesia masih menjanjikan bagi investor dalam maupun asing. Sumber daya alam masih merupakan daya tarik tersendiri dibandingkan negara-negara sesama ASEAN dalam posisi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi tersebut dapat terwujud apabila diimbangi dengan manfaat dari kesiapan peningkatan mutu infrastruktur, manusia, pengetahuan dan fisik.

Pasal 3 UUPM memberikan jaminan kepada seluruh perusahaan dalam rangka penanaman modal nasional maupun asing, bahwa penanaman modal berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

CSR dalam kegiatan penanaman modal dapat terlaksana jika dibarengi dengan lembaga yang kuat dalam menegakkan aturan dan proses yang benar. Sebagaimana dikatakan oleh Mochtar

Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan¹¹.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat diambil dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. pengaturan CSR terdapat dalam Pasal 15 huruf b UUPM dan Pasal 74 UUPT. Kedua UU tersebut mewajibkan perusahaan yang melakukan kegiatan dalam rangka penanaman modal untuk menerapkan CSR sebagai suatu kewajiban hukum
- b. Pelaksanaan CSR yang baik dan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku akan berimplikasi pada iklim penanaman modal yang kondusif. Untuk bisa mewujudkan CSR setiap pelaku usaha (investor) baik dalam maupun asing yang melakukan kegiatan di wilayah RI wajib melaksanakan aturan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia

2. Saran-saran

- a. Pemerintah sebagai regulator wajib dan secara konsisten menerapkan aturan dan sanksi apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak melaksanakan CSR sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b. Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya CSR dalam mewujudkan iklim penanaman modal di Indonesia.

¹¹Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, hal. 14.

DAFTAR PUSTAKA

Abrar Saleng, 2007, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.

Gurvy Kavei dalam Teguh , 2006, *Tanggung Jawab Sosial Harus Dilakukan*, Makalah pada seminar “*Corporate Social Responsibility*”: *Integrating Social Aspect into The Business*, Yogyakarta.

Hendrik Budi Untung, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 2009, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.

Ridwan Khairandy&Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance*, Total Media, Yogyakarta.

Roscoe Pound dalam Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, 1992, *Dasar-Dasar Filsafat, Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta.

Sonny A . Keraf, 1998, *Etika BIsnis : Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.

Sujud Margono, 2008, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Suhandari M. Putri, *Schema CSR*, Kompas 4 Agustus 2007.

Yusuf Wibisono, 2005, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR Corporate Social Responsibility*, Fascho, Gresik.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.